

# Membaca Ke[tidak]adilan Sosial Secara Kritis dari Berbagai Sudut Nusantara

Review Buku “Ketidakadilan Sosial, Kapitalisme dan Demokrasi: Catatan dari Penjuru Indonesia Tahun 2021” Elcid Dominggus Li & Sujarwoto (Eds.)

Journal of Humanity and Social Justice.  
Volume 5 Issue 2, 2023. 65-70  
Journal Homepage:  
<http://ojs.isjn.or.id/index.php/journalhsj>  
e-ISSN: 2657-148X

*Critically Reading Social [in]Justice from Various Angles of the Archipelago*  
Book Review “Social Injustice, Capitalism and Democracy: Notes from Across Areas of Indonesia in 2021” Elcid Dominggus Li & Sujarwoto (Eds)

Muhammad AY <sup>1</sup>

## ARTICLE INFO

**Keywords:** *democracy; social justice; social policy; capitalism; Indonesia*

**Kata Kunci:** *demokrasi; keadilan sosial; kebijakan sosial; kapitalisme; Indonesia*

### How to cite:

AY, M. (2023). Membaca Ke[tidak]adilan Sosial Secara Kritis dari Berbagai Sudut Nusantara [Review Buku “Ketidakadilan Sosial, Kapitalisme dan Demokrasi: Catatan dari Penjuru Indonesia Tahun 2021” Elcid Dominggus Li & Sujarwoto (Eds.)]. *Journal of Humanity and Social Justice*, 5(2), 65-70

## BOOK DESCRIPTION

Judul Buku : Ketidakadilan Sosial, Kapitalisme dan Demokrasi: Catatan dari Penjuru Indonesia Tahun 2021  
Penulis : Elcid Dominggus Li & Sujarwoto  
Penerbit : Indonesian Social Justice Network  
Tahun Terbit : 2021  
Tempat : Jakarta

### Abstract

*This book identifies social injustice in various critical domains from various places of the archipelago. Elcid et al elaborate conditions of social injustice that are still being experienced by subsistence groups in various regions in Indonesia. This book consists of several authors who attempt to answer the fundamental question of why social injustice continues? Isn't the principle of social justice enshrined in the foundation of our country? The results of the recording and reporting illustrate that social injustice is influenced by past colonial imperialism policies that have continued until then we are helpless in the face of today's global capitalism. Elcid et al suggested that the phenomenon of social injustice that arises is caused by pragmatic decisions at the level of policy makers who do not think about the direct impact on those who are weakest (the subsistence). In this book, Elcid*

<sup>1</sup> Jurusan Ilmu Politik, Universitas Teknologi Sulawesi, Indonesia.  
Email: [aymuhammad@gmail.com](mailto:aymuhammad@gmail.com)

---

*et al remind us that the importance of the state maintaining social justice is not just a jargon. This book provides a politics of knowledge and awareness for all readers to re-educate our basic understandings regarding social justice based on cases which are still existed in our environment.*

**Abstrak**

Buku ini menemuknali ketidakadilan sosial dalam berbagai ranah kritis dari beragam sudut Nusantara. Elcid dkk melakukan perekaman kondisi ketidakadilan sosial yang masih dialami oleh kaum subsisten di berbagai wilayah di Indonesia. Buku ini terdiri atas beberapa penulis yang berusaha menjawab pertanyaan mendasar mengapa kondisi ketidakadilan sosial masih terus berlangsung? Bukankah prinsip keadilan sosial sudah termaktub dalam dasar negara kita? Hasil dari perekaman dan reportase tersebut tergambar bahwa ketidakadilan sosial dipengaruhi dengan kebijakan imperialisme kolonial masa lalu yang terus berlangsung hingga kemudian kita tak berdaya menghadapi kapitalisme global saat ini. Elcid dkk berkesimpulan bahwa fenomena ketidakadilan sosial yang muncul disebabkan oleh keputusan-keputusan pragmatis di level pembuat kebijakan yang tidak memikirkan dampak langsung untuk mereka yang terlemah (kaum subsisten). Dalam buku ini, Elcid dkk mengingatkan kita bahwa pentingnya negara menjaga keadilan sosial bukan sekedar jargon. Buku ini hadir menjadi bagian dari politik pengetahuan dan penyadaran bagi pembaca untuk melakukan re-edukasi pemahaman-pemahaman dasar kita terkait keadilan sosial berdasarkan kasus yang terjadi di sekitar kita.

---

Buku ini berisi gugatan akan cita-cita pendiri bangsa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dan sila pada Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ke 5 tersebut menjadi pertanyaan mendasar dan menjadi harapan rakyat melalui hadirnya negara sebagai pelindung sebagaimana yang disimbolkan sebagai ‘perisai’ dalam lambang negara. Setelah 77 tahun Indonesia merdeka, apa yang dimaksud keadilan sosial yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa yang berusaha diwujudkan dan dilanjutkan oleh ‘administratur pelanjut’ nyata hanyalah kelanjutan kebijakan kolonial Belanda.

Buku ini terdiri dari 4 bagian Tema yang ditulis oleh 10 penulis sebagai kontributor.

Bagian Pertama; Paradoks Keadilan sosial dalam Republik ditulis oleh Domingus Elcid Li dan Sujarwoto, mengulas tentang rekonstruksi mengenai sejarah Indonesia terkait kebijakan keadilan sosial sejak zaman kolonial. Pada bagian ini juga dibahas mengenai indikator pemerataan yang dipakai di Eropa, model Orde Baru dan kemudian disandingkan dengan indikator keadilan sosial yang dibuat oleh Indonesia Social Justice Network (ISJN).

Bagian Dua; Tanah Air dan Ketidakadilan Sosial terdiri dari empat artikel yang ditulis oleh Domingus Elcid Li, Sujarwoto, Johan Petrus Talan dan Muhammad Reza, Andi Wahyudi, Maria Agustini Permata Sari, Sena Putra Prabujaya mengulas

tentang konteks lokal yang dialami terkait wacana ketimpangan dan ketidakadilan sosial warga Masyarakat dengan berbagai permasalahan dalam kosmis kehidupannya terkait ruang dan sumberdaya alam dan akses akan air bersih.

Bagian Tiga; Pertumbuhan Ekonomi dan Ketidakadilan Sosial terdiri dari empat artikel. Ditulis oleh Sujarwoto, Made Arsana, Diah Irawaty, Rani Purnama Hadi. Pada bagian ini, para penulis memaparkan permasalahan ekonomi dan ketidakadilan sosial dalam konteks lokal yang terjadi atas nama pertumbuhan dan devisa negara. Secara struktural negara tidak mampu melindungi warga baik diatas wilayahnya sendiri maupun diluar negaranya.

Dan terakhir pada Bagian Empat; Demokrasi Pasar dan ketidakadilan Sosial, terdiri dari satu artikel yang ditulis oleh Dominggus Elcid Li, Sujarwoto. Mengulas peluang pentingnya melakukan perubahan sosial pada level struktural. Proses demokratisasi di Indonesia perlu dilakukan dari bawah dengan membuka aspek-aspek mendasar yakni terkait pola pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia

Buku ini diawali dengan mendeskripsikan masalah tentang Indonesia terkait cita-cita keadilan sosial. Pergantian dari rezim ke rezim terkait regulasi keadilan sosial terpapar runut dalam buku ini. Mulai dari pasca kolonial - era Sukarno pada tahun-tahun awal kemerdekaan tahun 1945 hingga 1960an di saat Republik ini masih mencari bentuk bernegaranya ditengah jebakan-jebakan struktural sebagai bagian dari politik global. Di mana Indonesia berada pada pertarungan dan perebutan pengaruh dua kutub rivalitas global yaitu kapitalisme vs sosialisme. Kalangan terpelajar Indonesia pada saat itu terpetakan menjadi dua kelompok; Pertarungan antara 'kaum development minded' yang pro kapitalisme dan 'radical politicians' yang berpihak pada sosialisme Pertarungan ini berujung dengan apa yang kita kenal dengan pembantaian 1965 (Glassburner; dalam Elcid, hal 19). Suksesi dari Sukarno ke Suharto menjadi tonggak awal kemenangan 'development minded politician' yang melahirkan arah kebijakan yang berorientasi pada pertumbuhan (growth) dan pembangunan (development). Pergeseran meninggalkan paham sosialisme pun berlangsung secara bertahap. Apabila era Sukarno yang anti kolonialisme dan anti imperialisme dunia, di era Suharto mengalami perubahan. Jalan tengah yang ambil dikenal dengan istilah sosialisme ala Indonesia. Dimana negara bertugas memuluskan investasi demi mengejar angka pertumbuhan (growth) namun di sisi lain wajah sosialisnya tetap terlihat dengan ekonomi terencana (planned economy) dengan adanya Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) (Bagian Satu; Elcid, hal.9).

Buku ini mencoba mengurai bagaimana proses kesenjangan dan ketidakadilan sosial yang terjadi di negri ini. Di tahun-tahun pertama berkuasanya, tepatnya dua tahun setelah peralihan kekuasaan. Pada tahun 1967, Rezim Suharto merubah tatanan politik Indonesia yang tadinya anti asing menjadi pro investasi asing dengan dibentuknya Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing (BPPMA). Badan inilah yang sekarang menjadi cikal bakal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Meski langkah ini tidak begitu mulus dengan adanya demonstrasi mahasiswa yang dikenal dengan tragedi Malapetaka Limabelas Januari (Malari) tahun 1974. Demonstrasi anti investasi asing dengan melakukan unjuk rasa bertepatan dengan

kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka di Indonesia. Waktu itu Rezim Suharto mengadopsi corporate state, Sebuah model politik ekonomi yang di mana pemerintah bekerja sama dengan perusahaan dan serikat pekerja untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial. Tujuan dari sistem negara korporasi adalah untuk menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi dengan menjamin bahwa kepentingan semua pihak, termasuk perusahaan, pekerja, dan pemerintah, terjamin. Namun, sistem negara korporasi sering dikritik karena dapat menyebabkan oligarki di mana kekuatan ekonomi dan politik terpusat pada sekelompok kecil elit korporat dan serikat pekerja yang berkuasa. Kebijakan ini terus menguat hingga di era presiden Joko Widodo dengan melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi-regulasi yang dibuat oleh negara kemudian menjadi pertanyaan menggugat apakah negara masih hadir dan menjadi tameng bagi warganya atau malah menjadi predator bagi warganya sendiri? (Bagian Satu; Elcid, hal.24-25).

Beberapa penulis buku ini berpendapat bahwa beberapa isu ketidakadilan sosial di Indonesia sudah terjadi sejak masa kolonial. Dalam tulisan mengenai kebijakan dan aktivitas pertambangan misalnya, eksploitasi sumberdaya di Kalimantan dimulai sejak era kolonial pada tahun 1903. Selain tidak berkeadilan sosial yang memiskinkan secara sistemik juga menciptakan oligarki pertambangan yang melibatkan pemerintah pusat dengan unit kekuasaan lokal, pencemaran lingkungan dan deforestasi, juga melahirkan konflik yang berkepanjangan antara perusahaan dengan masyarakat lokal yang subsisten, konflik pertanahan masyarakat adat, juga konflik antar group di masyarakat (Bagian Dua; Wahyudi, Sari & Sujarwoto; Hal 131). Pada artikel lain, land reform-konflik agraria yang terjadi diberbagai kawasan di Indonesia terwakili oleh pemaparan tentang konflik ruang yang terjadi di Jakarta yang berimbas pada sulitnya warga mengakses air bersih dan permasalahan ini juga bermuara dari praktik kolonial saat Jakarta masih bernama Batavia (Bagian Dua, Talan & Reza; hal. 119). Bukan saja itu, praktik kolonial di bidang pariwisata juga masih langgeng hingga saat ini. Diawali dengan berdirinya perusahaan pariwisata pertama di Bali pada tahun 1914 yang menandai terjadinya peralihan sektor ekonomi kolonial Belanda di Bali. Kini muncul pertanyaan besar tentang posisi masyarakat lokal Bali dalam hiruk pikuk pariwisatanya yang menggiring pertanyaan besar apakah leisure capitalism tersebut bisa menghadirkan kesejahteraan atau sebaliknya, mendorong kemiskinan dan "pemiskinan budaya" di Bali? Komersialisasi pariwisata justru melahirkan "pemiskinan" budaya. Subak sistem irigasi yang berdasar budaya agraris orang Bali. Subak tidak hanya merepresentasikan sistem pengairan, tetapi juga sistem pranata sosial dan budaya kehidupan masyarakat Bali yang mengandung filosofi keharmonisan hubungan manusia dengan penciptanya, dengan sesama manusia dan alamnya yang dikenal dengan istilah Tri Hita Karana. Massifnya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian hingga berkurangnya jumlah subak di Bali. Penghilangan itu pula mengakibatkan munculnya kelangkaan air dan sumber mata air. Dalam ranah tradisi adat dan keagamaan juga terjadi transformasi yang disulut oleh komodifikasi di sektor pariwisata. Penulis menyitir pendapat Prof. Ida Bagus Mantra Mantan Gubernur Bali yang juga seorang akademisi. Bali kini bukan lagi budaya, adat, dan agama Hindu (Bali) yang menjadi tuntunan pariwisata, tetapi seolah-olah

pariwisata yang menjadi penuntun arah perkembangan budaya, adat dan agama (Bagian Tiga; Arsana hal. 211).

Dari pelbagai konteks ketidakadilan sosial negara terhadap warga ditanahnya sendiri, kondisi ketidakadilan sosial pun dirasakan ketika warganegara berada diluar negeri. Kebijakan migran ini pun juga pada awalnya berkaitan dengan kontrol negara dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan krisis ekonomi. Pada masa kolonial Belanda, pemerintah kolonial menggunakan migrasi untuk mengontrol konsolidasi kekuasaan dan menyelesaikan masalah kependudukan dan masalah sosial ekonomi lainnya. Pada tulisan Mengenai buruh migran perempuan, pengalaman-pengalaman ketidakadilan, diskriminasi, stigma, stereotype, kekerasan terhadap para Pembantu Rumah Tangga (PRT) migran perempuan Indonesia tidak terlepas dari ketidakadilan struktural dalam negara kita bila dikaitkan dengan budaya patriarkhi. Dalam tulisan ini pula dipaparkan bagaimana negara yang seharusnya memberi garansi perlindungan justru menunjukkan sikap sebaliknya. Negara menjadi bagian dari struktur global yang lebih mementingkan pendapatan negara berupa devisa daripada menjamin terpenuhinya berbagai hak PRT migran. Glorifikasi sebagai pahlawan devisa dan pahlawan pembangunan hanyalah jargon semata. Kontribusi sosial ekonomi mereka tidak dibarengi dengan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka sebagai warganegara, perempuan, pekerja dan bahkan sebagai manusia. Penulis juga menyoroti political will Pemerintah yang lemah membuat dukungan dan perlindungan sosial PRT migran mengalami hambatan struktural di negara tujuan dan tergantung pada posisi tawar Indonesia sebagai negara pengirim (Bagian Tiga; Irawaty, hal. 250).

Kajian lain yang menarik dari buku ini adalah pemaparan hasil penelitian ISJN yang membuat Indeks Keadilan Sosial versi Indonesia (Sujarwoto dkk, 2020). Indikator ini diadopsi dari Indeks keadilan sosial yang dikembangkan oleh Merkel & Giebler (2014), untuk mengevaluasi penerapan keadilan sosial di Eropa. Tujuh dimensi keadilan sosial Indonesia (seperti: mengurangi kemiskinan, akses pendidikan, akses pekerjaan, kesehatan, kohesi sosial dan non diskriminasi, penegakan hukum, demokrasi dan tata kelola pemerintahan) yang dirumuskan oleh ISJN telah relevan dengan delapan jalur pemerataan pembangunan Orde Baru kecuali dimensi terakhir terkait demokrasi dan tata kelola pemerintahan karena rezim Orde Baru yang otoriter dan sentralistik (Bagian Satu; Elcid, hal.39). Namun dari ketujuh indikator indeks keadilan sosial tersebut, buku ini tidak mengelaborasi isu ketidakadilan terkait akses pendidikan dan kesehatan dalam satu Bab khusus dengan lebih mendalam. Meskipun tentu kedua isu sosial ini didiskusikan di beberapa Bagian, misalnya seperti diulas oleh Sujarwoto pada Bab 3 dengan fokus pada kasus Yogyakarta. Namun belum ada Bab khusus yang mengulas bagaimana ketidakadilan terjadi pada akses layanan kesehatan dan pendidikan. Mengingat riset Power, Welfare and Democracy (PWD) (2015) yang melaporkan bahwa terdapat lima dari sepuluh isu yang terpenting terkait hak dan pelayanan dasar untuk segera dibenahi di Indonesia, yaitu isu pendidikan dan kesehatan (Paskarina dkk, 2015). Studi ini mengindikasikan bahwa akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih menjadi masalah mendasar keadilan sosial bagi kelompok-kelompok rentan di Indonesia.



Meskipun buku mengulas sebuah isu kompleks namun para penulis mampu mengulasnya dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Untuk itu, buku ini bisa menjadi sebuah referensi penting bagi para mahasiswa, aktivis dan professional dalam mengasah nilai sensitifitas sosial dengan bingkai keilmiahan kritis secara lugas. Selain itu, buku ini juga sangat relevan bagi para pemangku kepentingan khususnya bagi para pengambil kebijakan untuk dapat melihat konteks ketidakadilan sosial ditingkat lokal. Bahwa fenomena ketidakadilan sosial yang muncul dalam sekian peristiwa yang disajikan para penulis, tercermin keputusan-keputusan pragmatis di level pembuat kebijakan yang tidak memikirkan dampak langsung untuk mereka yang terlemah (subsisten) atau terkena dampak pembangunan (development). Akibatnya, efek dari pembangunan yang dulu para pengambil kebijakan pernah yakini dengan istilah efek menetes ke bawah (trickle down effect) akibat imbas dari pembangunan dan pertumbuhan pun tidak terlihat.

Buku ini melihat secara kritis berbagai fenomena ketidakadilan sosial dan berkontribusi pada kajian fenomena pembangunan sosial ekonomi Indonesia. Selain itu, buku ini juga merupakan bentuk advokasi berbasis studi/riset sehingga merupakan bagian dari politik pengetahuan bagi kita untuk melakukan re-edukasi pemahaman-pemahaman dasar kita terkait keadilan sosial. Sangat disarankan untuk menjadi bahan referensi bagi peneliti, mahasiswa, penstudi kebijakan publik serta praktisi dan birokrat.

## REFERENSI

- Giebler, Heiko dan Merkel, Wolfgang (2014) *Measuring Social Justice and Sustainable Governance in the OECD*, Zudova-Leskova, Z. dan Voracek, E (Eds) *Theory and Practice of the Welfare State in Europe in 20th Century* (pp.79-101). Bratislava: Historicky Ustav
- Li, Dominggus E. dan Sujarwoto (2021) *Ketidakadilan Sosial, Kapitalisme dan Demokrasi Catatan dari Penjuru Indonesia Tahun 2021*, Jakarta: Indonesia Social Justice Network
- Mas'udi, W. & Cornelis Lay (2018). *Politik Kesejahteraan: Kontestasi Rezim Kesejahteraan di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Paskarina, C., Asiah M. & Madung, O.G (2015). *Berebut Kontrol atas Kesejahteraan: Kasus-Kasus Politisasi Demokrasi di Tingkat Lokal*. Yogyakarta : Penerbit PolGov.
- Sujarwoto; Li, Dominggus E; Yani, A.A.; Mulyadi, A.W.E (2020) *Indeks Keadilan Sosial Indonesia*, Jakarta: Indonesia Social Justice Network